



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN
PARLIAMENTARY CONFERENCE
ON WORLD TRADE ORGANIZATION
(PCWTO)**

***In the Context of
13th Ministerial Conference
(MC13)***



**24-25 FEBRUARI 2024
ABU DHABI, PERSATUAN EMIRAT ARAB**



**LAPORAN
DELEGASI DPR RI**

**PARLIAMENTARY CONFERENCE ON WORLD
TRADE ORGANIZATION (PC WTO)**

Parlemen Persatuan Emirat Arab
24 - 25 Febuari 2024

A. Pendahuluan

Pada tanggal 24 dan 25 Februari 2024 Parlemen Persatuan Emirat Arab bersama-sama dengan Parlemen Eropa dan *Inter-Parliamentary Union* (IPU) menyelenggarakan *Parliamentary Conference on World Trade Organization* (PC WTO), dalam konteks pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri/Ministerial Conference WTO yang ke 13 (MC13). Pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang diadakan secara rutin setiap tahun dengan tujuan untuk memberikan masukan dari parlemen terhadap Konferensi Tingkat Menteri/Ministerial Conference (KTM/MC). Adapun isu-isu yang dibahas terkait dengan perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara anggota organisasi perdagangan dunia, WTO.

Pengiriman delegasi Indonesia yang menghadiri PC WTO di Abu Dhabi berdasarkan pada Surat Tugas Nomor 04/KU.05.01/KSOI/ST/02/2024 tentang Perjalanan Dinas menghadiri sidang PCWTO, Persatuan Emirat Arab dengan susunan delegasi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Fraksi	Keterangan
1	Dr. Fadli Zon	Gerindra	Ketua Delegasi
2	Putu Supadma Rudana	Demokrat	Anggota Delegasi
3	Dr. Sukamta Mantamiharja	PKS	Anggota Delegasi
4	Irine Yusiana Roba Putri	PDI-P	Anggota Delegasi
5	Himmatul Aliyah	Gerindra	Anggota Delegasi
6	Andi Achmad Dara	Golkar	Anggota Delegasi



Gambar 1.0 Delegasi DPR RI beserta jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.

Kemudian, sejalan dengan isu-isu yang tengah menjadi fokus diskusi di WTO, agenda utama PC WTO adalah sebagai berikut:

I. Rapat *Steering Committee* (Komite Pengarah)

1. Pembahasan *Draft Outcome Document*

Anggota Komite Pengarah (termasuk delegasi Indonesia), akan membahas teks rancangan awal dokumen hasil, serta usulan amandemennya, dengan tujuan agar rancangan revisi tersebut dapat didistribusikan bagi semua delegasi pada awal sesi pleno Konferensi. Draf konsolidasi akan didistribusikan kepada seluruh delegasi pada tanggal 25 Februari 2024 untuk diadopsi pada penutupan Konferensi.



Gambar 1.1 Dr. Fadli Zon selaku salah satu anggota *steering committee*

2. Tindak lanjut PC WTO Abu Dhabi dan hasil MC13

Pada sesinya yang ke-51, anggota Komite Pengarah merekomendasikan penguatan keterlibatan parlemen dalam mempromosikan perdagangan global, sekaligus mendorong diplomasi parlemen untuk memfasilitasi pertukaran praktik yang baik, membangun kapasitas dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan rekomendasi tersebut, anggota Komite Pengarah akan meninjau saran kegiatan tindak lanjut nasional/regional terhadap sesi PC WTO Abu Dhabi dan hasil MC13.

II. Sesi Pleno

1. **Sesi 1 – Abu Dhabi and beyond: Shaping and strengthening a multilateral trade system that delivers for all.**

Pada sesi ini dibahas mengenai agenda reformasi WTO, pengaktifan Kembali badan penyelesaian sengketa WTO (WTO Appellate Body), penyelesaian sejumlah agenda yang belum tuntas seperti subsidi perikanan, isu ketahanan pangan serta kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang.

2. **Sesi 2 – Trade and climate change: A win-win interaction**

Pada sesi ini dibahas mengenai relasi antara perdagangan internasional dengan perubahan iklim, khususnya yang terkait dengan industri berbahan bakar fosil, transisi hijau dan dampak industri terhadap lingkungan hidup, serta pembangunan berkelanjutan.

3. **Sesi3 – Digital trade in the era of resilient economies**

Sesi ini membahas mengenai perkembangan perdagangan digital dan isu-isu yang menyertai, seperti wacana penghentian moratorium pengenaan pajak terhadap perdagangan digital yang sedang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia.



Gambar 2.1 Andi Achmad Dara dan Irine Yusiana Roba Putri turut menghadiri pertemuan *Parliamentary Conference on World Trade Organization in the context of 13th WTO Ministerial Conference*

III. Kontribusi Delegasi Pada Sesi Pleno

1. Sesi 1 – Abu Dhabi and beyond: Shaping and strengthening a multilateral trade system that delivers for all.

Ketua Delegasi Dr. Fadli Zon ditunjuk sebagai co-chair menggantikan posisi anggota parlemen Persatuan Emirat Arab yang berhalangan hadir. Dr. Fadli Zon berkesempatan untuk menyampaikan pandangannya mengenai mendesaknya penguatan sistem perdagangan multilateral yang dapat mengakomodir semua kepentingan. Menurutnya, Konferensi Tingkat Menteri ke-13 mendatang harus bisa memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua orang, khususnya negara-negara berkembang dan kurang berkembang, sekaligus memperkuat perekonomian anggotanya.

Ketua BKSAP itu juga berpandangan bahwa penting untuk mengangkat topik reformasi penyelesaian perselisihan pada pertemuan tingkat menteri ke-13. Reformasi tersebut akan memungkinkan optimalisasi fungsi WTO untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti re-aktivasi badan penyelesaian sengketa dan menunjuk anggota untuk memulihkan efektivitas sistem penyelesaian perselisihan dua tingkat sambil menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan inklusi.



Gambar 3.1 Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon menjadi *co-chair* dan menyampaikan pendapatnya mengenai urgensi penguatan sistem perdagangan multilateral yang inklusif.

Sedangkan terkait dengan Perjanjian Subsidi Perikanan (FSA), Konferensi sebelumnya mengamanatkan agar FSA diselesaikan pada Konferensi Tingkat Menteri ke-13 mendatang. Secara khusus, terdapat diskusi mengenai perlakuan khusus dan berbeda (SDT) dan kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan (OCOF), yang keduanya memerlukan ruang kebijakan. Negara-negara berkembang memerlukan ruang kebijakan untuk menjamin kelangsungan jangka panjang kegiatan penangkapan ikan skala kecil dan skala kecil. Perjanjian Subsidi Perikanan, juga harus menjawab kebutuhan

untuk mendisiplinkan penangkapan ikan industri skala besar dan penangkapan ikan di perairan jauh, dengan memastikan bahwa perjanjian tersebut konsisten dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, yang mengatur eksplorasi dan perikanan. eksploitasi sumber daya laut di bawah yurisdiksi nasional.

Terkait dengan public stockholding untuk ketahanan pangan, Dr. Fadli Zon beranggapan perlunya untuk berpegang pada arahan Konferensi Tingkat Menteri sebelumnya, terutama arahan dari Bali dan Nairobi yang masih relevan. Untuk menghormati hak negara berkembang dan negara kurang berkembang untuk menggunakan perlakuan khusus dan berbeda dalam mengatasi masalah ketahanan pangan. Pandangan delegasi Indonesia yang disampaikan oleh Dr. Fadli Zon selaku Ketua Delegasi ini juga menjadi dasar dari posisi Indonesia pada saat mendiskusikan rancangan awal Outcome Document pada sesi rapat Komite Pengarah.

2. **Sesi 2 – Trade and climate change: A win-win interaction**

Pada sesi 2 mengenai Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup, Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana, berkesempatan untuk menyampaikan pandangan, terkait dengan pertumbuhan perdagangan global dan meningkatnya integrasi rantai nilai global. Hal tersebut dipandang menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana perdagangan dan lingkungan hidup saling berinteraksi. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang berasal dari perluasan perdagangan dapat mempunyai pengaruh langsung yang jelas terhadap lingkungan, meningkatkan polusi atau menghancurkan sumber daya alam. Sebaliknya, peningkatan perdagangan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial, sehingga menghasilkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola lingkungan.

Gambar 3.2 Para Pimpinan BKSAP DPR RI, mematik diskusi kepada para panelis terkait kebijakan hilirisasi sumber daya oleh negara-negara berkembang.



Putu Supadma Rudana juga menegaskan bahwa selama ini Indonesia secara konsisten memberikan dukungan terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, serta komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim melalui WTO. Indonesia juga terus berpartisipasi aktif dalam dialog WTO mengenai perdagangan berkelanjutan, seperti Trade Policy Review (TPR), untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangannya, khususnya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tercermin secara jelas dalam TPR.

Dengan memberikan perhatian lebih pada TPR, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya ditinjau secara menyeluruh oleh Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan WTO, sehingga meningkatkan transparansi dan memperkuat legitimasi langkah-langkah berkelanjutan yang didukung. Putu Supadma Rudana juga menyampaikan bahwa Indonesia menyerahkan penyempurnaan Laporan NDC pada bulan September 2022. Dalam NDC terbaru tersebut Indonesia berkomitmen terhadap target pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) yang lebih tinggi sebesar 31,89% (tanpa syarat) dan 43,2% (bersyarat) dibandingkan dengan masing-masing 29% dan 41% pada versi sebelumnya. NDC yang direvisi mencakup target yang jelas untuk merestorasi 2 juta hektar lahan gambut dan merehabilitasi 12 juta hektar lahan terdegradasi pada tahun 2030. Dokumen tersebut juga mengusulkan peningkatan ambisi adaptasi, sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim yang baru-baru ini dikembangkan.

Putu Supadma Rudana menutup penyampaian pandangannya dengan memantik diskusi melalui pertanyaan kepada para panelis yang hadir. Putu secara gamblang bertanya apakah para panelis yang hadir saat ini setuju bahwa negara berkembang memiliki hak untuk merubah ekspor bahan mentah menjadi ekspor bahan yang telah diolah demi mendapatkan tambahan pemasukan? pertanyaan ini terkait dengan kebijakan hilirisasi Indonesia. Menjawab pertanyaan tersebut para panelis menjawab sesuai pandangannya masing-masing. Panelis dari Parlemen Eropa misalnya, menjawab tidak setuju. Sedangkan panelis dari Turki menjawab setuju. Beberapa delegasi dari negara lain seperti Afrika Selatan juga menyatakan dukungannya pada kebijakan hilirisasi.

3. **Sesi III - *Digital trade in the era of resilient economies***

Pada sesi terakhir ini, Wakil Ketua BKSAP Dr. Sukamta Mantamiharja berkesempatan untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan isu-isu digital di WTO. Menurutnya moratorium pajak bea cukai atas transmisi elektronik yang berlaku saat ini tidak boleh diperpanjang tanpa batas waktu. Keputusan untuk memperpanjang moratorium bea cukai pada transmisi elektronik harus didasarkan pada definisi dan ruang lingkup yang disepakati secara multilateral dan bersama.

Oleh karena itu, pengakhiran bagi moratorium tersebut, sebagaimana yang tengah di perjuangkan oleh sejumlah negara berkembang seperti Indonesia dan Afrika Selatan dimaksudkan untuk memberikan negara-negara berkembang lapangan bermain yang lebih adil dalam perdagangan elektronik global. Argumen utamanya adalah bahwa penerapan pajak impor dapat menjadi kebijakan yang efektif untuk menjembatani kesenjangan digital, memastikan keaslian data perdagangan, meningkatkan daya saing UMKM, dan melindungi transaksi dari kegiatan kriminal.

Gambar 3.3 Delegasi BKSAP DPR RI menggarisbawahi kebijakan moratorium pajak bea cukai atas transmisi elektronik pada pertemuan *Parliamentary Conference on World Trade Organization in the context of 13th WTO Ministerial Conference.*



Pandangan tersebut juga didasarkan pada laporan penelitian UNCTAD yang menyatakan bahwa moratorium akan mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak dalam jumlah besar, khususnya bagi negara-negara berkembang. Misalnya, terdapat potensi kerugian pajak sebesar USD 8 Miliar pada tahun 2017 bagi negara-negara berkembang, sedangkan negara-negara maju hanya akan mengalami kerugian sekitar USD 212 juta. Indonesia akan rugi USD 54 juta atau sekitar sebesar 667 miliar dalam penerimaan bea masuk.

Oleh karena itu, Dr. Sukamta mendesak para anggota untuk mengevaluasi pentingnya ruang kebijakan pada tingkat tertentu untuk memungkinkan penyesuaian yang sangat diperlukan terhadap pengenaan pajak bea cukai atas impor barang digital yang dikirimkan secara elektronik. Ruang kebijakan harus mencakup ruang finansial dan peraturan.

Selanjutnya, hak atas bea dan pajak harus diberikan kepada negara asal atau sumber, dimana kegiatan ekonomi terjadi dan nilai dihasilkan. Karena *e-commerce* dan produk digital memiliki karakteristik yang unik; Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan mekanisme pengumpulannya agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif tanpa merugikan negara dimana barang digital tersebut dikonsumsi. Pandangan yang disampaikan oleh Dr. Sukamta ini mendapatkan dukungan dari panelis dan delegasi Afrika Selatan. Panelis Afrika Selatan bahkan memandang bahwa kebijakan seperti moratorium tersebut merupakan contoh nyata dari “Digital Imperialism”. Sebuah kebijakan imperialisme lama dengan kemasan baru kebijakan digital.



Gambar 3.4 Terdapat tiga sesi sidang pada pertemuan *Parliamentary Conference on World Trade Organization in the context of 13th WTO Ministerial Conference* yakni *Abu Dhabi and beyond: Shaping and strengthening a multilateral trade system that delivers for all; Trade and climate change: A win-win interaction* dan; *Digital trade in the era of resilient economies*

B. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan keikutsertaan delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Delegasi Dr. Fadli Zon dari Fraksi Gerindra dapat dikatakan cukup sukses dalam berpartisipasi aktif pada tiap sesi PC WTO Abu Dhabi. Delegasi telah menyuarakan aspirasi dan memberikan masukan yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia di WTO seperti isu subsidi perikanan, public stockholding, hilirisasi dan moratorium pengenaan pajak bagi transaksi digital.
2. Dokumen keluaran PC WTO dan hasil MC13 perlu di informasikan kepada komisi-komisi terkait sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait, khususnya dalam legislasi dan pengawasan.
3. BKSAP DPR RI agar mengikuti perkembangan isu-isu paska MC13 khususnya yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia dalam perdagangan internasional.

C. Anggaran

Kegiatan partisipasi Delegasi DPR RI pada pertemuan *Parliamentary Conference on World Trade Organization (PC WTO)* dalam konteks pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri/Ministerial Conference WTO yang ke 13 (MC13) ini menggunakan anggaran APBN dari anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Dewan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 947.229.400 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah)

D. Penutup

Demikianlah Laporan Delegasi DPR RI menghadiri pertemuan *Parliamentary Conference on World Trade Organization (PC WTO)* dalam konteks pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri/Ministerial Conference WTO yang ke 13 (MC13). Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban Parlemen untuk terbuka dan transparan kepada publik.

Jakarta, 28 Februari 2024

Ketua Delegasi,



Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc

A-86



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr